

PENTA HELIX COLLABORATION DALAM MEWUJUDKAN DAPU (DESA ANTI POLITIK UANG) DI KABUPATEN BANYUMAS

¹⁾Yunita Ratna Sari *, ²⁾Windi Angraeni

^{1), 2)}UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto

¹⁾yunitaratna36@uinsaizu.ac.id, ²⁾windiangraeni@yahoo.com

*yunitaratna36@uinsaizu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kolaborasi penta helix dalam mewujudkan DAPU (Desa Anti Politik Uang) di kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggabungkan berbagai sumber literatur baik yang berupa data primer maupun data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi penta helix dalam mewujudkan DAPU (Desa Anti Politik Uang) belum berjalan dengan optimal dan efektif karena belum terjalinnya relasi kerja sama dalam satu wadah yang sama antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyumas dan KPU Kabupaten Banyumas selaku penyelenggara pemilu, masyarakat sebagai sasaran program DAPU (Desa Anti Politik Uang), pemerintah desa selaku fasilitator, akademisi berperan konseptor dan media dalam menyebarkan informasi terkait DAPU. Para aktor penta helix hanya bekerja dalam menyelesaikan program kerja masing-masing instansi.

Kata Kunci: Penta Helix, Kolaborasi, Desa Anti Politik Uang (DAPU)

Abstract

This study aims to analyze the penta helix collaboration in realizing DAPU (Anti Money Politics Village) in Banyumas district. This study uses a qualitative descriptive approach by combining various sources of literature, both in the form of primary data and secondary data. The results of the study show that the penta helix collaboration in realizing DAPU (Anti-Money Politics Village) has not run optimally and effectively because there has not been a cooperative relationship in the same forum between the Banyumas Regency Election Supervisory Body (Bawaslu) and the Banyumas Regency KPU as the election organizers, community as the target of the DAPU (Anti Money Politics Village) program, the village government as a facilitator, academics as conceptors and the media in disseminating

information related to DAPU. The penta helix actors only work to make the work programs of each agency a success.

Kata Kunci: Penta Helix, Collaboration, Anti-Money Politics Village

PENDAHULUAN

Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi di tahun 2024. Salah satu hambatan serius dalam pemilu serentak tahun 2024 yaitu politik uang. Praktik money politics tidak hanya terjadi antara peserta pemilu dan pemilih akan tetapi telah menyebar hingga penyelenggara pemilu. Seperti yang diketahui bahwa politik uang merupakan tindakan dilaksanakan oleh individu atau sekelompok orang guna membeli suara pemilih untuk kepentingan politik bagi dirinya dan kelompoknya. (Supriadi Lawani, 2021). Mengacu pada pelaksanaan pemilu 2019 hingga pilkada 2020, ada beberapa bentuk modus politik uang antara lain kandidat biasanya memberikan kupon sembako, uang elektronik, bahan bangunan serta janji politik kepada konstituen. Besaran uang yang diberikan kepada konstituen dari Rp 20.000 hingga Rp 200.000. (Tri Subarkah, 2023).

Setiap pelaksanaan pemilu selalu terjadi praktik politik uang. Dibuktikan dengan pemilu 2009, kasus politik uang sebanyak 691 kasus berdasarkan tahapan meliputi kampanye (537 kasus), masa tenang (95 kasus), pemungutan suara (57 kasus) serta penetapan hasil pemilu (2 kasus). Kemudian, pileg 2014, semua pelanggaran pemilu ditempati oleh perkara politik uang. (Aminuddin Kasim dan Supriyadi, 2019, p. 3). Berdasarkan data ICW, kasus politik uang pada pemilu legislatif 2014 sebanyak 313 kasus dengan rincian modus pemberian uang (104 perkara), barang (128 perkara), jasa (27 perkara) serta pemakaian sumber daya negara (54 perkara). Apabila dilihat dari jumlah uang yang diterima oleh pemilih yakni antara 26 ribu hingga 50 ribu sebanyak 28 kasus. Partai politik yang paling banyak terlibat politik uang dalam pemilu legislatif 2014 yaitu Golkar (57 kasus), PPP (30 kasus), PAN dan Demokrat (25 kasus), PDIP (24 kasus). Pelaku politik uang yaitu calon legislatif (170 kasus) serta tim pemenang (107 kasus). (INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW), 2014).

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang masuk dalam klaster rawan sedang dalam keterlibatan politik uang diantara 29 provinsi lainnya. (joglojateng.com, 2023). Dibuktikan dengan data Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengusut 27 kasus dugaan politik uang yang terjadi selama masa tenang pemilu 2019 yang menyebar 15 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Rincian persoalan politik uang terjadi di Jawa Tengah meliputi kabupaten Banyumas sebanyak 7 kasus, Salatiga sebanyak 4 kasus, Wonogiri, Batang, Boyolali Brebes sebanyak 2 kasus serta 1 kasus politik uang terjadi di Banjarnegara, Kudus, Cilacap, Demak, Kebumen, Pekalongan, Purworejo dan kota Tegal. Pelakunnya yakni partai politik yang notabennya peserta pemilu atau calon legislatif. (mediaindonesia.com, 2019). Berkaca masih banyaknya kasus politik uang di Jawa Tengah, akhirnya Bawaslu Jawa Tengah tahun 2019 membentuk DAPU dengan harapan dapat merealisasikan pemilu adil, bersih dan berintegritas. Selain itu, tujuan lain dari DAPU yakni memberikan pemahaman kepada masyarakat selaku pemilih

mengenai pemilihan sehingga nantinya masyarakat dapat menjadi pemilih yang cerdas dan bijak serta berani menolak praktik politik uang. Seperti yang diketahui bahwasannya politik uang sebagai kejahatan yang merusak demokrasi disebabkan cikal bakal terjadinya tindak korupsi pejabat atau wakil rakyat saat menjabat. Proses pemilu yang bermula dari politik uang maka kandidat yang terpilih baik itu pemimpin daerah maupun wakil rakyat mempunyai pemikiran bagaimana cara mengembalikan modal politik ketimbang memperjuangkan kepentingan rakyat. (Warto, 2019).

Berdasarkan data Bawaslu Jawa Tengah ada 116 desa/kelurahan pengawasan dan 171 desa/kelurahan anti politik uang. Umumnya, tiap kabupaten/kota memiliki 3 desa pengawasan dan 3 desa/kelurahan anti politik uang yang dibina. (Ahmad Muqsith dan Nur Imam Subono, 2022, p. 3). Adapun salah satu kabupaten yang masuk DAPU yakni Banyumas karena merupakan kabupaten yang jumlah kasus politik uang paling banyak dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah sebanyak 6 kasus terjadi di kecamatan Sokaraja, Purwokerto Selatan, Cilongok, Tambak, Jatilawang, Purwojati. (Sumarwoto, 2019). Alasan yang mendasari peneliti memilih Banyumas sebagai lokasi penelitian karena Banyumas masuk kategori rawan sedang praktik politik uang mengacu pada pelaksanaan pemilu atau pilkada sebelumnya. Bawaslu Kabupaten Banyumas mengemukakan pada pemilu 2019 sebanyak 197 TPS rawan politik uang. Dapat dilihat kecamatan paling rawan di Banyumas terdiri atas Sumbang, Purwokerto Selatan, Cilongok, Banyumas yang TPSnya rawan karena terjadi peristiwa intimidasi dan politik uang pada pilkada 2018.

Lebih lanjut, risiko gesekan antar pendukung pasangan calon baik presiden, calon legislatif cukup tinggi disebabkan sejumlah ketua partai tinggal di kecamatan rawan politik uang. Ditambah lagi, potensi konflik juga cukup tinggi di Banyumas karena DPT banyak seperti di Purwokerto Selatan, satu kelurahan ada 50 TPS. Kemudian pemahaman masyarakat desa mengenai pemilu masih rendah misal di kecamatan Cilongok ada 375 TPS tersebar dalam 30 desa sehingga sangat rawan pelanggaran pemilu. (liputan6.com, 2019). Laporan Bawaslu Kabupaten Banyumas menjelaskan ketika pilkada 2018 ada 33 dugaan politik uang dan sebanyak 11 kasus politik uang dalam pemilu 2019. Meskipun Bawaslu Banyumas sudah melaksanakan tindakan preventif politik uang namun masih tetap kecolongan karena politik uang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi bukan sporadis. Terlebih lagi, di tahun 2023, terdapat 15 desa yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa (pilkades) seperti desa Jambu, Klinting, Kracak, Tanjung dan Datar ditengah menjelang pemilu serentak 2024. Oleh karena itu, agar Desa Anti Politik Uang (DAPU) di Banyumas yang telah terbentuk sejak tahun 2019 lebih optimal dalam mengatasi politik uang apalagi menjelang pemilu 2024 maka diperlukan partisipasi seluruh pihak tidak hanya dari pemerintah dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Banyumas beserta masyarakat saja, namun juga pihak lain mencakup akademisi, media dan dunia usaha. Kolaborasi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, media serta dunia usaha dikenal dengan Penta Helix Collaboration. Mengacu hal tersebutlah peneliti tertarik untuk melakukan riset yang berjudul “Penta Helix Collaboration Dalam Mewujudkan DAPU (Desa Anti Politik Uang) di Kabupaten Banyumas”.

METODE

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu penta helix collaboration dalam mewujudkan DAPU (Desa Anti Politik Uang) di kabupaten Banyumas. Sementara, unit analisis yang lebih spesifik adalah siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam mewujudkan DAPU di kabupaten Banyumas mencakup pemerintah, swasta/dunia usaha, akademisi dan masyarakat serta peran pihak-pihak dalam pelaksanaan desa anti politik uang di kabupaten Banyumas.

Riset ini memakai data primer merupakan data langsung peneliti diperoleh melalui wawancara. Data primer berhubungan dengan kolaborasi penta helix dalam mewujudkan DAPU di kabupaten Banyumas. Sedangkan data sekunder berupa hasil studi, survei dan dokumen resmi dari pemerintah. Selanjutnya, peneliti memakai metode pengumpulan data berupa wawancara kepada informan kunci secara tatap muka langsung. Adapun informan kunci dalam penelitian ini yaitu Bawaslu Kabupaten Banyumas, KPU Kabupaten Banyumas, Akademisi UNSOED, Media (Radar Banyumas), Dunia Usaha, pemerintah desa dan masyarakat desa Kaliwedi, Kasegaran, Kaliwangi yang desanya dijadikan Desa Anti Politik Uang (DAPU). Disamping itu, peneliti melakukan dokumentasi dari dokumen- dokumen di lapangan berupa foto, catatan lapangan, dokumen resmi instansi. Dokumen yang diperoleh peneliti di tempat penelitian selanjutnya dianalisis mengingat dokumentasi sebagai pelengkap pengumpulan data sebelumnya yakni observasi maupun wawancara.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Program Desa Anti Politik Uang (DAPU) merupakan program nasional dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) bertujuan untuk mencegah praktik politik uang yang terjadi menjelang pemilu baik saat pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres), pemilihan legislatif (Pileg), pemilihan kepala daerah (Pilkada) sampai pemilihan kepala desa (Pilkades). Mengingat DAPU sebagai program dari Bawaslu tentunya Bawaslu di tingkat pusat maupun Bawaslu ditingkat daerah sebagai lembaga inti mempunyai tugas mencegah pelanggaran pemilu, utamanya politik uang demi mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Hal itu sesuai dengan tupoksi Bawaslu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Salah satu daerah yang menjalankan program DAPU yaitu kabupaten Banyumas. Mulai tahun 2019 sampai 2022, kabupaten Banyumas mengimplementasikan program DAPU. Tapi, tidak semua desa secara bersamaan dijadikan desa percontohan program DAPU, melainkan bertahap.

Adapun desa di kabupaten Banyumas yang ditetapkan sebagai desa percontohan pada tahun 2019 antara lain desa Kasegaran kecamatan Cilongok, desa Kaliwangi kecamatan Purwojati, desa Kaliwedi kecamatan Banyumas. Baru ke tahun selanjutnya, ada desa Suro kecamatan Kalibagor. Untuk menciptakan program DAPU agar berjalan dengan lancar diperlukan kolaborasi antar berbagai stakeholder. Pemangku kepentingan atau stakeholder lebih mengarah pada siapa yang terlibat dalam sebuah program tersebut. Stakeholder bisa dari unsur pemerintah, dunia usaha atau swasta, masyarakat, akademisi serta media.

Pemerintah harus berperan sebagai pengendali disebabkan lembaga pemegang kekuasaan sehingga memiliki kewenangan membuat kebijakan publik dan regulasi. Berkaitan dengan pelaksanaan program Desa Anti Politik Uang atau DAPU di kabupaten Banyumas, pemerintah daerah Banyumas belum secara aktif terlibat dalam program tersebut. Seharusnya, selaku lembaga negara di daerah yang mana desa berada dibawah naungan pemerintah daerah Banyumas sekaligus dijadikan lokus pelaksanaan program DAPU wajib terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, peraturan daerah, membentuk jaringan kemitraan antar pemangku kepentingan lainnya. Namun faktanya, pemerintah daerah kabupaten Banyumas belum terlibat dalam program DAPU disebabkan pemerintah daerah kabupaten Banyumas memiliki pandangan bahwa DAPU sebagai program dari Bawaslu sehingga yang paling berperan penuh adalah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banyumas. Tidak terlibatnya pemerintah daerah Banyumas dalam implementasi program DAPU di kabupaten Banyumas, mengakibatkan pemerintah tidak mampu melakukan koordinasi dengan baik dengan para stakeholder yang sebenarnya berkontribusi pada keberhasilan DAPU.

Dibuktikan dengan program DAPU semestinya untuk mencegah dan mengurangi kasus politik uang dalam pemilu hanya sebatas sebuah program milik instansi tertentu saja dalam hal ini yaitu Bawaslu kabupaten Banyumas. Bahkan KPU kabupaten Banyumas selaku penyelenggara pemilu kurang terlibat dalam penerapan program DAPU di kabupaten Banyumas dengan alasan mereka punya program sosialisasi sendiri kepada pemilih pemula dengan anggaran tersendiri dari KPU kabupaten Banyumas. Akademisi sebagai aktor dalam model penta helix berperan konseptor. Seperti melakukan penelitian mengenai politik uang dan membuat grand design agar program DAPU tidak hanya sebatas program yang berhenti ketika sudah tidak ada lagi anggaran tetapi tetap berkelanjutan meskipun tidak didukung oleh anggaran. Mengingat, akademisi merupakan sumber pengetahuan dengan konsep beserta teori-teori terbaru. Membahas tentang peran akademisi dalam program DAPU di kabupaten Banyumas belum terlibat secara maksimal. Akademisi dilibatkan dalam DAPU di kabupaten Banyumas akan tetapi sebatas memberikan penyuluhan mengenai bahaya politik uang dan penyuluhan dilakukan saat launching program DAPU di kabupaten Banyumas. Seyogyanya, dalam program DAPU itu sangat penting terlebih di tahun 2024 merupakan tahun pemilu meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan legislatif (pileg) diperlukan peran gesit dari akademisi perguruan tinggi serta lembaga penelitian untuk memberdayakan masyarakat berbasis pengetahuan agar masyarakat lebih melek politik dan berani menolak politik uang. Bukan hanya melakukan penyuluhan satu hingga tiga kali ke desa- desa saat awal-awal program DAPU diaktualisasikan di Banyumas.

Apabila, menelaah lebih detail mengenai pemberdayaan masyarakat khususnya pengetahuan, prosesnya tidak cepat membutuhkan beberapa tahapan dari persiapan, pengkajian, perencanaan kegiatan yang sinkron dengan kondisi masyarakat, tahap pelaksanaan serta evaluasi. Berhubungan dengan DAPU yang dilaksanakan tingkat desa mayoritas masyarakatnya berpendidikan rendah perlu upaya ekstra dari akademisi guna mentransfer ilmu pengetahuan dari masyarakat

yang mulanya tidak tahu apa itu demokrasi yang baik, pemilu, politik uang sampai masyarakat paham betul bahaya politik uang serta cara berdemokrasi yang sehat berdampak masyarakat memiliki sikap untuk berani menolak politik uang.

Dunia usaha atau swasta dalam model penta helix berperan penggerak atau enabler sebuah program. Seperti yang diketahui, dunia usaha atau swasta merupakan entitas melakukan proses bisnis dapat memberikan sumbangan dana pada keberhasilan suatu program. Implementasi program DAPU di kabupaten Banyumas tidak melibatkan dunia usaha atau swasta manapun. Hal itu mengakibatkan program DAPU di kabupaten Banyumas kurang optimal karena mengandalkan anggaran dari pemerintah yang terbatas. Seharusnya, swasta atau dunia usaha perlu dilibatkan dalam program DAPU di kabupaten Banyumas agar DAPU bisa dijalankan secara berkesinambungan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Yon Daryono, S.Sos, M.Sos selaku Kordiv Penanganan, Pelanggaran, Data, Informasi Bawaslu Kabupaten Banyumas pada tanggal 3 Juli 2024 menyampaikan program DAPU dilaksanakan tahun 2019, 2020, 2021, 2022 karena ada anggaran yang di cut of imbas dari pandemi covid 19. Mengacu hal tersebut, sudah sewajarnya melibatkan swasta atau dunia usaha untuk supporting anggaran demi keberlanjutan program DAPU di kabupaten Banyumas terlebih menjelang pemilu tahun 2024.

Media bertindak sebagai expander dalam mendukung publikasi, promosi dan membuat brand image. Media massa menjadi sarana sosialisasi dalam memperkenalkan desa anti politik uang (DAPU) kepada masyarakat luas. Penyebaran informasi mengenai program DAPU di kabupaten Banyumas telah dipublikasikan ke beberapa media massa antara lain radar banyumas, antara news, majalah gatra, suara merdeka Banyumas, jateng post dan kompas id. Tidak hanya melalui media massa yang dapat diakses secara online, publikasi mengenai DAPU di kabupaten Banyumas juga disebarluaskan melalui web pemerintah desa seperti pemerintah kelurahan Berkoh, pemerintah desa Kaliwangi, web Bawaslu Jawa Tengah, web desa Karangendep, web desa Lesmana, web desa Piasa Kulon.

Yang perlu dianalisis yakni publikasi mengenai program DAPU di kabupaten Banyumas hanya ketika pertama kali program DAPU diterapkan ke desa-desa Banyumas yang menjadi percontohan, tidak setiap kegiatan yang mendukung program DAPU misalnya kegiatan penyuluhan, koordinasi dengan stakeholder lain. Lebih lanjut, informasi program DAPU di Banyumas kurang disebarluaskan melalui media sosial mencakup instagram, twitter, facebook padahal sekarang ini masyarakat banyak yang mengakses media sosial. Sehingga, masyarakat sedikit mengetahui program DAPU bahkan beberapa masyarakat yang desanya dijadikan sasaran program DAPU tidak mengetahui program tersebut.

Masyarakat mempunyai peran akselerator artinya masyarakat dapat menjadi penghubung antar pemangku kepentingan guna memperlancar proses berjalannya sebuah program. Terkait dengan pelaksanaan program DAPU di kabupaten Banyumas, masyarakat selain sasaran dalam DAPU sekaligus masyarakat tingkat desa selaku pemilik dari wilayah pedesaan memperoleh hak atas pengembangan wilayahnya untuk dikembangkan menjadi desa anti politik uang sehingga masyarakat sukarela dan senang hati berpartisipasi dalam program DAPU. Secara riilnya, hanya perwakilan masyarakat desa yang dilibatkan dalam program DAPU

di kabupaten Banyumas mencakup karangtaruna, ibu pkk. Padahal perwakilan masyarakat desa banyak meliputi BPD, RT, RW, lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD), kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD). Perwakilan masyarakat yang diundang dalam sosialisasi program DAPU di kabupaten Banyumas kurang giat. Tidak heran jika masyarakat desa kurang memahami program DAPU yang dijalankan pada desanya.

Identifikasi Peranan Penta Helix Dalam Mewujudkan DAPU (Desa Anti Politik Uang) Di Kabupaten Banyumas. Penta helix lahir sebab adanya kemauan untuk menyempurnakan sebuah kolaborasi stakeholder yang dapat menjaga keberlanjutan suatu program. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan beberapa peran aktor dalam mewujudkan program DAPU di kabupaten Banyumas sebagai berikut :

- a. Sebagai regulator merujuk pada penyedia arahan guna menyeimbangkan penyelenggaraan suatu program. Peran regulator sama dengan pemegang segala pelaksanaan program. Dalam perwujudan program DAPU (Desa Anti Politik Uang) di kabupaten Banyumas, Bawaslu Kabupaten Banyumas bertindak pemegang peran regulasi yang menjalankan tugasnya sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Berkaca dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu Kabupaten Banyumas menjadi garda terdepan dalam hal pencegahan pelanggaran pemilu utamanya politik uang. Selain Bawaslu Kabupaten Banyumas, masyarakat juga menjadi regulator karena masyarakat sebagai kunci sukses tidaknya pelaksanaan program DAPU (Desa Anti Politik Uang).
- b. Sebagai Fasilitator diartikan pencipta suasana kondusif yang mana ada penyediaan kebutuhan bagi berlangsungnya pelaksanaan suatu program. Kebutuhan yang diperlukan dalam penyelenggaraan program dapat secara materil maupun jasa. Untuk perwujudan program DAPU (Desa Anti Politik Uang) di kabupaten Banyumas, yang bertindak fasilitator adalah akademisi dan pemerintah desa. Akademisi berperan memberikan pengetahuan berupa penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya politik uang. Sementara, pemerintah desa mendukung program DAPU dijalankan di desanya berupa memberikan contoh cara berdemokrasi yang baik dan mengundang perwakilan masyarakat desa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dalam program DAPU (Desa Anti Politik Uang) misalnya sosialisasi.
- c. Sebagai publikator mengarah penyedia layanan informasi guna menyalurkan seluruh kegiatan dan informasi berhubungan dengan program DAPU (Desa Anti Politik Uang). Dalam mempublikasi program DAPU di kabupaten Banyumas melalui media massa yang dapat diakses secara digital mencakup radar banyumas, jateng post, antara news serta web pemerintah desa diantaranya Kaliwangi, Piasa Kulon, Berkoh, Lesmana.

KESIMPULAN

Kolaborasi penta helix dalam mewujudkan DAPU (Desa Anti Politik Uang) belum berjalan dengan optimal dan efektif karena belum terjalinnya relasi kerja sama dalam satu wadah yang sama antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyumas dan KPU Kabupaten Banyumas selaku penyelenggara

pemilu, masyarakat sebagai sasaran program DAPU (Desa Anti Politik Uang), pemerintah desa selaku fasilitator, akademisi berperan konseptor dan media dalam menyebarkan informasi terkait DAPU. Para aktor penta helix hanya bekerja dalam menyukseskan program kerja masing-masing instansi. Faktor penghambat kolaborasi penta helix dalam DAPU di kabupaten Banyumas antara lain kurangnya komunikasi antar aktor penta helix mulai dari pemerintah daerah Banyumas hingga pemerintah desa yang dijadikan lokus pelaksanaan program DAPU (Desa Anti Politik Uang), belum adanya aturan turunan berupa peraturan daerah yang mengatur secara spesifik mengenai program DAPU di kabupaten Banyumas. Hambatan dalam pelaksanaan DAPU di Banyumas antara lain tidak menjalin kerjasama dengan dunia usaha atau swasta sehingga program DAPU terhenti ketika anggaran habis serta kurangnya sosialisasi di tingkat desa disebabkan pemerintah desa hanya mengundang ibu PKK dan karangtaruna dalam kegiatan DAPU. Dampak yang ditimbulkan dari kolaborasi penta helix dalam DAPU di kabupaten Banyumas diantaranya sebagian masyarakat mengetahui politik uang.

REFERENSI

Jurnal

- Agus Riwanto, d. (2021). MEMBANGUN MODEL DESA ANTI POLITIK UANG SEBAGAI STRATEGI BAWASLU DALAM MENCEGAH PILKADA CURANG. *Masalah- Masalah Hukum*, 50(3). From <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/34412>
- Ahmad Muqsith dan Nur Imam Subono. (2022). Implementasi Kebijakan Pembuatan Desa Anti Politik Uang oleh Bawaslu Kabupaten Kendal. *International Journal of Demos*, 4(2). From <https://hk-publishing.id/ijd-demos/article/view/289>
- Ahmad Muqsith dan Nur Imam Subono. (2022). Implementasi Kebijakan Pembuatan Desa Anti Politik Uang Oleh Bawaslu Kabupaten Kendal. *IJD (International Journal of Demos)*, 4(2). From <https://hk-publishing.id/ijd-demos/issue/view/22>
- Aminuddin Kasim dan Supriyadi. (2019). MONEY POLITICS PADA PEMILU 2019 (Kajian Terhadap Potret Pengawasan dan Daya Imperatif Hukum Pemilu). *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 2(1). From <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JAP/article/view/36>
- Lati Praja Delmana dkk. (2020). PROBLEMATIKA DAN STRATEGI PENANGANAN POLITIK UANG PEMILU SERENTAK 2019 DI INDONESIA. *ELECTORAL GOVERNANCE, Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2). From <https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/view/61>
- Lina Putri Pasaribu dkk. (2023). KOLABORASI PENTA HELIX DALAM PENANGANAN PASCA BENCANA GEMPA BUMI. *SHARE, Social*

- Work Journal, 13(1). From
<https://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/47909/20701>
- Nursyidah Arsyad. (2022). DESA ANTI POLITIK UANG (STUDI KASUS: DESA ALENANGKA KECAMATAN SINJAI SELATAN KABUPATEN SINJAI). SAWERIGADING, *Journal of Public Administration*, 1(1). From
<http://ojs.unsamakassar.ac.id/jpa/article/view/61>
- Primandaru, I. O. (2020). Implementasi Quadruple Helix Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kreatif. WAHANA, *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 23(2). From
<http://jurnalwahana.aaykpn.ac.id/index.php/wahana/article/view/238>
- Ratih Nur Indah Sari dan Suharno. (2021). Program Desa Anti Politik Uang Desa Sardonoarjo Kabupaten Sleman. E- *Journal Student- E-CIVICS: Jurnal Kajian Mahasiswa PPKN*, 10(5). From
<https://journal.student.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/17435>
- Suprayitno, P. D. (2021). Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Pengembangan Desa Wisata Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 10(1). From <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JISPAR/article/view/10589>
- Yuan Febriyanti Alina. (2022). Reaktualisasi Pendidikan Politik dalam Menghadapi Politik Uang Melalui Gerakan Desa Anti Politik Uang. *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 2(2). From
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/politicos/article/view/5361>

Buku

- Bachruddin Saleh Laturlean S. (2019). *Strategi Bisnis Pariwisata*. Bandung: Humaniora.
- John W. Cresswell. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

INTERNET

- Bawaslu DIY. (2018). *Buku Panduan Desa/Kelurahan Anti Politik Uang*. Yogyakarta: Bawaslu DIY. From
https://ppid.gunungkidul.bawaslu.go.id/main/front/files/file_177_Panduan%20Desa%20APU-DIY.pdf

- bawaslu.go.id. (2023, Juli 3). Jadi Pemilih Paling Dominan, Bawaslu Ajak Generasi Muda Berpartisipasi Aktif di Pemilu 2024. From <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/jadi-pemilih-paling-dominan-bawaslu-ajak-generasi-muda-berpartisipasi-aktif-di-pemilu-2024>
- Choirul Saleh. (2020). *Konsep, Pengertian dan Tujuan Kolaborasi*. Banten: Universitas Terbuka. From <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/DAPU6107-M1.pdf>
- cnnindonesia.com. (2023, Januari 7). ICW Soroti Potensi Politik Uang Baru Lewat Digital Jelang Pemilu. From <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230107065530-617-897274/icw-soroti-potensi-politik-uang-baru-lewat-digital-jelang-pemilu>
- Gripp. (2022, September 17). Why is Quadruple Helix engagement so important ? From <https://gripp.eu/why-isquadruple-helix-engagement-so-important/>
- INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW). (2014). *313 Kasus Politik Uang Ditemukan dalam Pileg 2014*. Jakarta: ICW. From <https://antikorupsi.org/id/article/313-kasus-politik-uang-ditemukan-dalam-pileg-2014>
- joglojateng.com. (2023, September 26). Jateng Masuk Kategori Rawan Sedang Keterlibatan Politik Uang. From <https://joglojateng.com/2023/09/26/jateng-masuk-kategori-rawan-sedang-keterlibatan-politik-uang/>
- liputan6.com. (2019, April 16). 3 Wilayah di Banyumas Paling Rawan dalam Pemilu 2019, Apa Saja? From <https://www.liputan6.com/regional/read/3942537/3-wilayah-di-banyumas-paling-rawan-dalam-pemilu-2019-apa-saja?page=2>
- mediaindonesia.com. (2019, April 20). Sejumlah Kasus Politik Uang Diselidiki. From <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/230717/sejumlah-kasus-politik-uang-diselidiki>
- nasional.kontan.co.id. (2023, November 7). PPATK: e-Wallet dan e-Money Bisa Jadi Modus Politik Uang pada Pemilu 2024. From <https://nasional.kontan.co.id/news/ppatk-e-wallet-dan-e-money-bisa-jadi-modus-politik-uang-pada-pemilu-2024>
- Sumarwoto. (2019, April 17). Enam kasus dugaan praktik politik uang ditemukan di Banyumas. From <https://jateng.antaranews.com/berita/230690/enam-kasus-dugaan-praktik-politik-uang-ditemukan-di-banyumas>
- Supriadi Lawani. (2021, November 9). Bahaya Politik Uang Terhadap Pemilu dan Demokrasi. From <https://kab-banggai.kpu.go.id/berita/baca/7807/bahaya-politik-uang-terhadap-pemilu-dan-demokrasi>

tolitoli.bawaslu.go.id. (2023, April 23). From
<https://tolitoli.bawaslu.go.id/fenomena-politik-uang-tanggung-jawab-siapa/>

Tri Subarkah. (2023, Agustus 13). Sederet Modus Politik Uang Pemilu 2024. From <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/604482/sederet-modus-politik-uang-pemilu-2024>

Warto. (2019, Januari 28). Pembentukan Desa APU Anti Politik Uang. From <https://desabendungan.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/322-Pembentukan-Desa-APU-Anti-Politik-Uang#:~:text=Seperti%20disampaikan%20Panwascam%20Kecamatan%20Karangmojo,yang%20adil%20bersih%20dan%20berintegritas.>